BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan melaksanakann fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan hasil layanan, fasilitasi fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya.
   b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BPMP Kabupaten Bandung Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 64); dan
b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BPMP Kabupaten Bandung Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 64); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 27 September 2017

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 50 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 September 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	LAYANAN PERIZINAN	LAYANAN NON PERIZINAN	KETERANGAN
I.	Urusan Kesehatan			
A.	Sarana Pelayanan Medis	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C		Perizinan Memulai Usaha
		2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D		Perizinan Memulai Usaha
		3. Izin Mendirikan Klinik Pratama		Perizinan Memulai Usaha
		4. Izin Mendirikan Klinik Utama		Perizinan Memulai Usaha
		5. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan		Perizinan Memulai Usaha
		6. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C		Perizinan Operasional Usaha
		7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D		Perizinan Operasional Usaha
		8. Izin Operasional Klinik Pratama		Perizinan Operasional Usaha
		9. Izin Operasional Klinik Utama		Perizinan Operasional Usaha
		10. Izin Operasional Klinik Kecantikan		Perizinan Operasional Usaha

		11. Izin Operasional Puskesmas		Perizinan Operasional Usaha
		12. Izin Klinik Jamu		Perizinan Operasional Usaha
B.	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	1. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Penyelenggaraan Optikal		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Pelayanan Hemodialisis		Perizinan Operasional Usaha
		5. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotik dan Zat Adiktif Terlarang		Perizinan Operasional Usaha
		6. Izin Operasional Pengendalian Vektor		Perizinan Operasional Usaha
		7. Izin Teknis Pelayanan Kesehatan SPA Tradisional		Perizinan Operasional Usaha
		8. Izin Penyelenggaraan pekerjaan Kefarmasian		Perizinan Operasional Usaha
		9. Izin Penyelenggaraan Usaha Obat		Perizinan Operasional Usaha
		10. Izin Toko Alat Kesehatan		Perizinan Operasional Usaha
C.	Tenaga Pelayanan Kesehatan			
	Tenaga Medis :	1. Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Pengobatan Komplementer - Alternatif		Perizinan Operasional Usaha
	Tenaga Keperawatan :	1. Izin Pelayanan Perawat		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Pelayanan Bidan		Perizinan Operasional Usaha

		3. Izin Pelayanan Perawat Gigi		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Pelayanan Perawat Anastesi		Perizinan Operasional Usaha
	Tenaga Kefarmasian, Gizi dan Kesehatan Lingkungan :	1. Izin Tenaga Kefarmasian		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Tenaga Gizi		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Tenaga Sanitarian		Perizinan Operasional Usaha
	Tenaga Keterapian Fisik :	1. Izin Pelayanan Fisioterafis		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Ortotis Prostetis		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Okupasi Terafis		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Terafis Wicara		Perizinan Operasional Usaha
		5. Izin Pengobatan Tradisional / HATRA (Akupuntur)		Perizinan Operasional Usaha
	Tenaga Keteknisan Medis :	1. Izin Kerja Radiografer		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Kerja Tenaga Refraksionis Optisen / Optometris		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Kerja Perekaman Medis		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Kerja Teknisi Gigi		Perizinan Operasional Usaha
		5. Izin Kerja Analis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medik		Perizinan Operasional Usaha

D.	Kesehatan Tertentu		1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Perizinan Operasional Usaha
			2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel	Perizinan Operasional Usaha
			3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	Perizinan Operasional Usaha
			4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	Perizinan Operasional Usaha
			5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Perizinan Operasional Usaha
			6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Perizinan Operasional Usaha
			7. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Perizinan Operasional Usaha
			8. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional	Perizinan Operasional Usaha
			9. Surat Terdaftar Tukang Gigi	Perizinan Operasional Usaha
II.	Urusan Pekerjaan Umum	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali IMB untuk rumah tinggal di luar kawasan perumahan sampai dengan luasan 250 m2 dan rumah tinggal di kawasan perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m2		Perizinan Memulai Usaha
		3. Izin Penyelenggaraan Reklame		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama		Perizinan Memulai Usaha
III.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Izin Tempat Pelayanan Pemakaman		Perizinan Operasional Usaha

IV.	Urusan Tenaga Kerja	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		Perizinan Operasional Usaha
V.	Urusan Pertanahan	Izin Lokasi	Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR)	Perizinan Memulai Usaha
VI.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan		Perizinan Memulai Usaha
		2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Lain (IPBL)		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (ITPSB3) Skala Kabupaten		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Pengumpulan Limbah B3		Perizinan Operasional Usaha
VII.	Urusan Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Angkutan Umum di luar Lintasan Trayek		Perizinan Operasional Usaha
VIII.	Urusan Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal (IP-PM)		Perizinan Memulai Usaha
		2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (IP-Perluasan)		Perizinan Memulai Usaha
		3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (IP- Perubahan)		Perizinan Memulai Usaha
		4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (IP-Penggabungan)		Perizinan Memulai Usaha

IX.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Izin Usaha Perikanan (IU-Perikanan)		Perizinan Operasional Usaha
X.	Urusan Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar)		Perizinan Operasional Usaha
XI.	Urusan Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB)		Perizinan Operasional Usaha
		2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUPP)		Perizinan Operasional Usaha
		3. Izin Usaha Perkebunan (IUP/Terintegrasi)		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Perubahan Luas Lahan		Perizinan Operasional Usaha
		5. Izin Perubahan Jenis Tanaman		Perizinan Operasional Usaha
		6. Izin Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan		Perizinan Operasional Usaha
		7. Izin Diversifikasi Usaha		Perizinan Operasional Usaha
XII.	Urusan Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		Perizinan Operasional Usaha
		2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Perizinan Operasional Usaha
		3. Tanda Daftar Gudang (TDG)		Perizinan Operasional Usaha
		4. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)		Perizinan Operasional Usaha
		5. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)		Perizinan Operasional Usaha
		6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)		Perizinan Operasional Usaha

XIII.	Urusan Perindustrian	Izin Usaha Industri (IUI)	Surat Keterangan Kawasan Berikat (SKKB)	Perizinan Operasional Usaha Perizinan Memulai Usaha
Jumlah		75 Layanan Perizinan	11 Layanan Non Perizinan	

BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER